



# SMA

**MAJU BERSAMA  
HEBAT SEMUA**

MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN SMA



## **ADAPTASI PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI**



9 772626 835008



# PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA

NEW  
NORMAL

Berikut protokol kesehatan Covid-19 yang harus ditaati ketika di tempat kerja berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

- **PENGATURAN WAKTU KERJA**
- **CEK SUHU TUBUH**
- **WAJIB GUNAKAN MASKER**
- **MENYEDIAKAN SARANA CUCI TANGAN**
- **MEMASTIKAN AREA KERJA BERSIH & HIGIENIS**
- **MEMBENTUK TIM PENANGANAN COVID-19**



23 JULI 2020

# SELAMAT HARI ANAK NASIONAL





# daftar isi

## SMA Maju Bersama Hebat Semua

Media Komunikasi Membangun dan Memajukan SMA

**Pengarah**  
Purwadi Sutanto

**Pemimpin Redaksi**  
Winner Jihad Akbar

**Dewan Redaksi**  
Dhany Hamidan Khoir,  
Juandanislyah, Hastuti  
Mustikaningsih, Ekawati.

**Redaktur Ahli**  
Agus Salim, Augustin  
Wardhani.

**Redaktur Pelaksana**  
Jim Bar Pen

**Redaksi**  
Nurul Mahfudi, Uce  
Veriyanti, Wiwiet  
Heriyanto, Aam Masroni,  
Erik Herdian Karsana,  
Umi Wahyuningsih, Joni  
Faisal.

**Desain dan Layout**  
Wahyu Akbar

**Sekretariat Redaksi**  
Wiwit Widya Hendriani

**Direktorat SMA**  
Kementerian Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Jl. RS Fatmawati, Cipete,  
Jakarta Selatan.

☎ 021-75911532

📘 Direktorat SMA

📷 direktorat.sma

📧 @dit\_sma

📧 Direktorat SMA

✉ publikasi.psm@  
kemdikbud.go.id

🌐 www.sma.kemdikbud.go.id

# 07

## Salam Redaksi

**Purwadi Sutanto**  
Direktur SMA



# 20

## Khusus

**Evaluasi PPDB Tahun 2020**  
Pusat dan Daerah harus Bekerja Sama

# 10

## Fokus

### Tahun Ajaran Baru

Adaptasi Pembelajaran di Masa Pandemi

Prinsip mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan menjadi landasan penting dalam menentukan penyelenggaraan pembelajaran tahun pelajaran baru 2020-2021 yang masih dalam masa pandemi. Keputusan dari empat kementerian menjadi pengukuh adaptasi pembelajaran di masa pandemi.



# 44

## Mozaik

**KH Ahmad Dahlan**  
Pelopor Modernisasi Pendidikan



# 32

## Profil Sekolah

**SMAN 1 Gorontalo**  
Optimalkan Gawai Siswa Jadi Pandai

# 24

## Tata Kelola

**Fleksibilitas BOS**  
Boleh Fleksibel Mengelola Dana BOS

# 28

## Peserta Didik

**Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**  
Kunci Sekolah Aman di Masa New Normal

# 46

# 26

## Sarpras

**Bantuan Sarana Prasarana**  
Sarana Penunjang Belajar Tatap Muka di Masa Pandemi

# 30

## Kolom

**Dra Augustin Wardhani**  
SMA, Jalan Menyiapkan Generasi Unggul

## Kreasi Siswa

**Nathania Luvena Lais**  
"Aku, Kamu, Kita: Agen Perubahan"





**ZI-WBK**  
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

KOMPONEN PENGUNGKIT

# Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi



**Penataan Tatalaksana**



**Penataan Sistem Manajemen SDM**

**Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja**



**Penguatan Sistem Pengawasan**



**Peningkatan Kualitas Layanan Publik**



# MANAJEMEN PERUBAHAN

SALAM REDAKSI



# PANDEMI BELUM USAI

**PURWADI SUTANTO**  
DIREKTUR SMA



## Salam Redaksi,

**K**erinduan mendalam terhadap suasana pembelajaran di sekolah dirasakan mayoritas warga sekolah. Tak hanya peserta didik, tetapi juga para guru, tenaga kependidikan, dan juga kepala sekolah. Namun, kondisi pandemi COVID-19 masih belum usai. Sebarannya di beberapa daerah masih fluktuatif. Bahkan hingga kita memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020-2021 kondisi masih sama.

Menyikapi kondisi demikian, kita patut bersyukur karena Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, telah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan keselamatan peserta didik dan warga satuan pendidikan lainnya. Kebijakan yang diambil atas pertimbangan banyak faktor, khususnya tentang kondisi sebaran virus corona di berbagai wilayah.

Karena itu kita harus memahami jika memasuki tahun pelajaran baru ini ada 97 persen peserta didik yang tetap belajar dari rumah. Sisanya, 3 persen diperbolehkan untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tentu saja dengan prosedur atau protokol kesehatan yang ketat, termasuk masih harus bergantian saat masuk sekolah sebagaimana dianjurkan Pemerintah untuk pencegahan tertular COVID-19. Mereka harus taat dan ketat menerapkan protokol kesehatan.

Sementara bagi yang belum berkesempatan, jangan berkecil hati. Kita tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ikutilah proses pembelajaran yang dibimbing para guru dengan semangat. Kita jangan sampai patah semangat. Yakinlah kondisi ini pasti ada akhirnya. Dengan segala

daya upaya, seperti halnya yang sudah masuk, bagi peserta didik yang masih harus belajar dari rumah juga harus tetap berdisiplin diri untuk menerapkan protokol kesehatan. Jika tidak penting kita harus bersabar di rumah. Jika beraktivitas di luar taatlah menerapkan protokol kesehatan: memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan diri sebagaimana dianjurkan. Dengan cara inilah kita bisa berkontribusi besar dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.

Pandemi belum usai, kita jangan putus asa untuk berusaha maksimal melakukan pencegahan. Insya Allah tak ada yang sia-sia, bahkan saat kita harus memendam rindu untuk kembali ke sekolah. Pada waktunya kita akan kembali bersekolah dengan penuh kegembiraan.





## LOGO BARU



## Re-Branding Direktorat SMA

*New normal, new logo* begitulah mungkin yang dapat menggambarkan Direktorat SMA kali ini, dengan semangat baru dan bentuk peralihan dari yang awalnya bernama Direktorat Pembinaan SMA menjadi Direktorat SMA. Direktorat SMA kini hadir dengan logo baru per tanggal 14 Juli 2020. Tujuannya, memberikan makna dan ciri Direktorat SMA sebagai identitas. Logo berwarna abu-abu ini mewakili citra SMA yang erat dengan warna putih-abu, filosofi lengkap dari logo baru Direktorat SMA adalah sebagai berikut:

- (1) Logo mengungkap sinergitas Tri Pusat Pendidikan yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan generasi maju dan unggul dengan berlandaskan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yakni nasionalisme, kemandirian, religius, integritas, dan gotong royong.
  - (2) Warna abu-abu terinspirasi dari ciri khas seragam SMA di Indonesia, namun juga mengartikan komunikatif dan informatif untuk mencapai prestasi.
  - (3) Warna putih mengartikan pelajar yang berkarakter dilandasi dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia diantaranya nasionalisme, kemandirian, religius, integritas, gotong royong.
  - (4) Warna merah mengartikan kompetensi dan karakter yang kuat berlandaskan penguatan literasi pada siswa SMA.
  - (5) Warna kuning mengartikan semangat pelajar dalam menggapai cita-cita.
  - (6) Warna jingga mengartikan persaudaraan dan semangat persatuan.
  - (7) Gambar segitiga dasar melambangkan tiga jurusan di SMA, yaitu sains, sosial, dan bahasa serta melambangkan keselarasan antara tubuh, jiwa dan pikiran. Arah kurva segitiga menuju ke kanan atas melambangkan puncak kesuksesan dan juga melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - (8) Gambar pola riak air menggambarkan sifat adaptif pada pola pendidikan di SMA sesuai perkembangan zaman.
  - (9) Logo dimaksudkan untuk keperluan dalam penambahan aksesoris kegiatan Direktorat SMA seperti Media Publikasi, Informasi, Presentasi, Banner kegiatan, dll.
- Semoga dengan logo baru tercipta prestasi-prestasi baru dan dapat menularkan semangat pendidikan ke seluruh penjuru negeri. ●

BERITA  
DIREKTORAT

## Kolaborasi Webinar

Pandemi COVID-19 datang mengubah berbagai sektor, tidak terkecuali bidang pendidikan formal, menyesuaikan dengan kondisi, pemerintah membuat berbagai aturan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.

Begitupun dengan pendidikan menengah di Indonesia, menyongsong semester gasal Tahun Ajaran 2020/2021, proses pembelajaran termasuk juga aktivitas penunjang ekstrakurikuler dan pendidikan karakter perlu diketahui dan dikritisi oleh masyarakat. Maka, Direktorat SMA ikut serta dalam Webinar Kenormalan Baru Pendidikan Menengah di Indonesia pada tanggal 12 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Webinar ini menghadirkan Juandanilyah (Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat SMA).



## Webinar Saling Memahami di Masa Pandemi

Tak terasa sudah masuk tahun ajaran baru 2020/2021, sebelum memulai pembelajaran di jenjang sekolah yang lebih tinggi, lazimnya dilakukan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), lalu bagaimana PLS dilakukan saat pandemi seperti ini? Direktorat SMA menyelenggarakan program Webinar Bincang SMA episode 6 pada tanggal 9 Juli 2020 mengenai Sosialisasi PLS. Webinar yang mengangkat tema besar "Saling Memahami di Masa Pandemi" ini menghadirkan Juandanilyah (Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat SMA), Ratna Budiarti (Kepala SMA N 70 Jakarta), dan Rini Setianingsih (Forum Indonesia Muda) sebagai pembicara.

Acara yang diikuti terbatas oleh 200 peserta ini dibuka oleh Purwadi Sutanto (Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbud). Dalam kesempatan tersebut, Purwadi menegaskan "Seperti yang kita semua ketahui, bahwa tidak ada perubahan dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021, namun untuk sekolah tatap muka yang diizinkan hanya sekolah yang terdapat di zona hijau" Di penghujung acara terdapat testimoni dari Kepala Sekolah SMAN 20 Bandung, dan Ketua OSIS SMAN 1 Tasikmalaya.



# Adaptasi Pembelajaran

[DI MASA PANDEMI]



Prinsip mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan menjadi landasan penting dalam menentukan penyelenggaraan pembelajaran tahun pelajaran baru 2020-2021 yang masih dalam masa pandemi. Keputusan dari empat kementerian menjadi pengukuh adaptasi pembelajaran di masa pandemi.



**K**ementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Pembelajaran pada Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademi Baru di masa pandemi COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan, tahun pelajaran 2020-2021 resmi dimulai tanggal 13 Juli 2020. Meski demikian, bukan berarti sekolah normal sudah dimulai. Semua masih mengacu pada protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. "Sejauh ini hanya kabupaten dan kota yang masuk kategori zona hijau menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional, yang bisa memulai pembelajaran tatap muka namun tetap dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat," ujar Mendikbud tentang salah satu poin yang menjadi keputusan bersama empat kementerian.

Ada empat poin penting Keputusan Bersama 4 menteri terkait penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini: Pertama, tahun ajaran 2020-2021 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dimulai pada bulan Juli 2020, tahun pelajaran 2020-2021 pada pendidikan tinggi dimulai pada bulan Agustus 2020, tahun pelajaran 2020/2021 pada pendidikan tinggi keagamaan dimulai pada bulan September 2020, tahun ajaran 2020/2021 pada pesantren dimulai pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, dan tahun pelajaran 2020/2021 pada pendidikan keagamaan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.

Kedua: Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2020/2021 tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan untuk pelaksanaan tatap muka adalah sebagai berikut: a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian

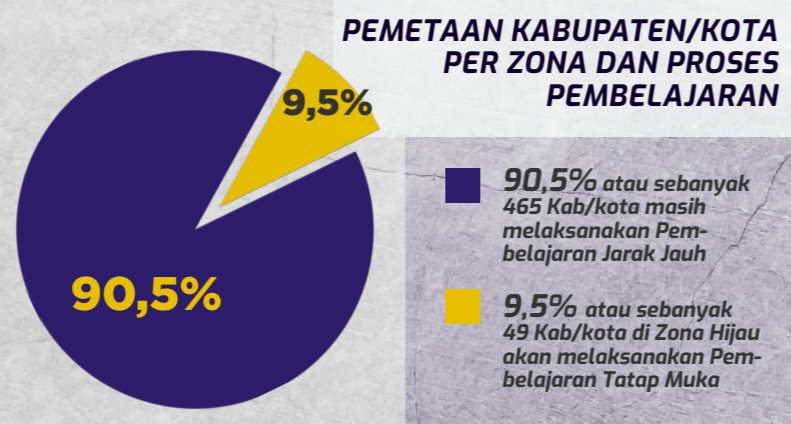
Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat; b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

Ketiga: Ketentuan pembelajaran tatap muka dicualikan bagi pesantren, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi; dan keempat, pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 sebagaimana dilaksanakan berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19, dengan mengutamakan protokol kesehatan.

**Komitmen pada Protokol**

Terkait kemungkinan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, Mendikbud menjelaskan, prosesnya pun dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari jenjang SMP dan SMA atau SMK terlebih dahulu. "Ini mengenai kenyamanan, mengenai kepercayaan kita kepada institusi sekolah yang bisa melakukan protokol kesehatan yang baik. Itu kuncinya," ujar Nadiem.

Kebijakan membuka sekolah untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, sejatinya berada di tangan kepala daerah. Kepala sekolah dan orang tua juga punya hak untuk menentukan apakah sekolahnya sudah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kembali. "Jadinya, sekolah-sekolah kalau mau membuka kembali pembelajaran tatap muka harus benar-benar meyakinkan semua orang tua bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan," kata Mendikbud.



**"Kebijakan membuka sekolah untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, sejatinya berada di tangan kepala daerah. Kepala sekolah dan orang tua juga punya hak untuk menentukan apakah sekolahnya sudah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kembali."**

**- Mendikbud Nadiem Makarim**

Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka, lanjut Mendikbud, bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama

memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar pemeriksaan dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. "Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh," tegas Mendikbud.

Kemudian, apabila ada orang tua yang merasa tidak siap jika anaknya harus kembali bersekolah maka ia berhak untuk menolak dan anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah. Saat ini, Kemendikbud sedang melakukan monitoring untuk memeriksa kesiapan beberapa wilayah zona hijau yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka kembali.

"Jadi harapan kami adalah pemda dan kepala dinas itu bisa benar-benar mendukung proses ini, dan tentunya Kemendikbud siap mendukung dan salah satu caranya adalah tentunya sumber dayanya kita jadikan fleksibel," jelas Mendikbud.





Kepala sekolah dan guru SMAN 2 Teluk Bintang menerapkan protap COVID-19 mulai dari persiapan penyeberangan menuju sekolah di Pulau Pangkil, Kep. Riau.

### Adaptasi Masa Transisi

Kemdikbud juga sudah menetapkan protokol kesehatan di sekolah saat kebiasaan baru. Protokol kesehatan di sekolah merupakan aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di institusi pendidikan. Dalam buku saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang disusun Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri pembelajaran tatap muka dilaksanakan melalui dua fase yakni masa transisi dan masa kebiasaan baru.

Masa transisi berlangsung selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadwal pembelajaran seperti jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilaksanakan secara bergilir. Satuan pendidikan harus mem-

bagi rombongan belajar dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

Dalam buku saku tersebut juga disebutkan, apabila masa transisi selesai, dan daerah tempat satuan pendidikan itu berada tetap dikategorikan sebagai Zona Hijau maka satuan pendidikan itu boleh masuk ke masa kebiasaan baru.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi mengapresiasi kebijakan Kemendikbud yang menegaskan tahun ajaran baru bukan berarti harus sudah masuk sekolah dengan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, pembukaan kembali sekolah memang sudah seharusnya menyesuaikan dengan tingkat penyebaran serta kemampuan pemerintah dalam mengelola bidang pendidikan

di era kebiasaan baru. Oleh karena itu, hal yang paling penting yang harus menjadi perhatian penyelenggara pendidikan adalah kesehatan dan keselamatan hidup dari para peserta didik juga warga sekolah lainnya.

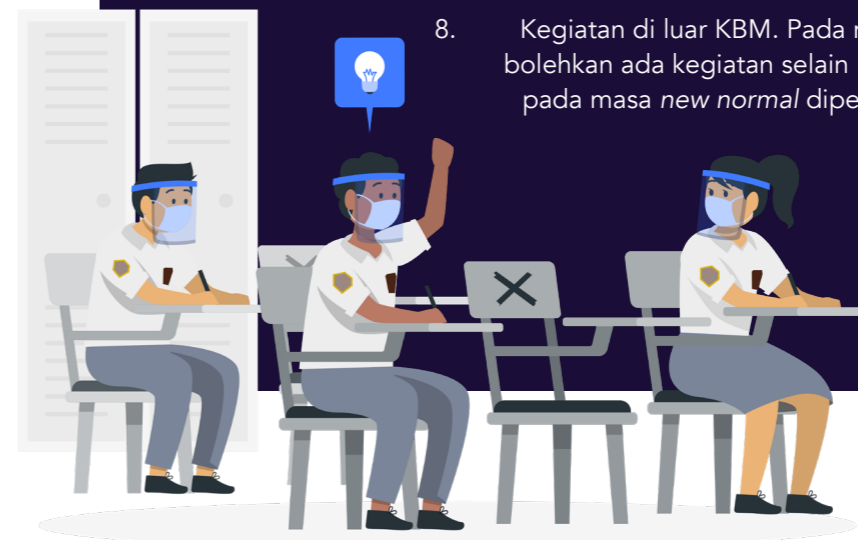
Satuan pendidikan harus melakukan persiapan matang dalam menghadapi *new normal*. Guru, kepala sekolah, dan seluruh pihak yang terkait dengan sekolah harus menyiapkan berbagai skenario penerapan protokol kesehatan jika siswa harus masuk sekolah. Bersikap hati-hati dalam menerapkan *new normal* di sekolah menjadi keharusan.

Intinya, kesehatan dan keamanan warga pendidikan harus menjadi prioritas bersama. Kondisi yang harus dijaga hingga kita semua terbebas dari penyebaran COVID-19. ●

# Protokol Kesehatan di Sekolah

Dikutip dari laman Kemdikbud, berikut protokol kesehatan di sekolah untuk panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran baru di masa COVID-19:

1. Wajib Menggunakan Masker.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun. Setiap sekolah yang sudah membuka proses pembelajaran di sekolah wajib mempersiapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan serta desinfektan.
3. Cek Suhu. Setiap orang yang memasuki sekolah juga dicek suhunya dengan menggunakan *thermogun*. Sesuai aturan protokol kesehatan, peserta didik dan tenaga pengajar wajib berada dalam kondisi sehat. Orang dengan penyakit komorbid tidak diperkenankan masuk sekolah.
4. Waktu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMA pada masa transisi paling cepat Juli 2020 dan masa *new normal* paling cepat September 2020.
5. Jarak di Kelas. Pada masa transisi dan *new normal*, harus jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas (standar 28-36 peserta didik per kelas).
6. Kantin. Kantin sekolah pada masa transisi tidak diperbolehkan. Dan pada *new normal* diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan di sekolah.
7. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Olahraga. Masa transisi tidak diperbolehkan. Sementara pada masa *new normal* diperbolehkan, kecuali kegiatan yang menggunakan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter.
8. Kegiatan di luar KBM. Pada masa transisi tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Kegiatan di luar KBM pada masa *new normal* diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan di sekolah. ●





TAHUN PELAJARAN BARU

# Mengacu Ketat pada Protap

**Satuan pendidikan menjadi kunci penyelenggaraan pembelajaran, baik yang masih belajar jarak jauh maupun yang sudah memulai pembelajaran tatap muka. Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tetap menjadi prioritas.**

**M**emasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, bangsa kita belum usai didera Pandemi COVID-19. Karena itu, berdasarkan zona penyebaran virus corona saat ini baru 9,5% sekolah di wilayah zona hijau boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Sisanya 90,5% masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau masih belajar di rumah. Bagaimana potret di lapangan, berikut gambaran di beberapa sekolah baik yang menyelenggarakan tatap muka maupun yang masih PJJ:



Sudirman  
KEPALA SMAN 1 SEBATIK

**SMAN 1 Sebatik, Kaltara**

Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia berada di wilayah paling utara Indonesia tak lepas dari pandemi COVID-19. Beruntung wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Utara ini masuk kategori zona kuning. Sebaran wabah memang tidak separah wilayah lain, namun SMAN 1 Sebatik yang masuk Kabupaten Nunukan ini menjadi satu dari tiga puluh satu sekolah di Kalimantan Utara yang belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Sejak pandemi di wilayah Kabupaten Nunukan memang tidak ada PSBB, namun sekolah tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran wabah di sekolah dengan tidak melaksanakan pembelajaran. "Kami menerapkan PJJ. Belajar dari rumah dengan sistem daring menggunakan zoom



Pemeriksaan berkas PPDB oleh tenaga pendidik dengan perlengkapan kesehatan lengkap

meeting, mengikuti program TVRI, melalui WhatsApp, dan media sosial lainnya," jelas Kepala SMAN 1 Sebatik Sudirman.

Kendala yang di hadapi antara lain keterbatasan akses internet. Bagi peserta didik yang mengami kendala PJJ, maka guru mapel melaksanakan kunjungan rumah untuk pendampingan pembelajaran dan



Martelia Puspa  
KEPALA SMAN 2  
TELUK BINTAN



Prosedur kesehatan, mencuci tangan dengan sabun di SMAN 2 Teluk Bintang

**SMAN 2 Teluk Bintang, Kepri**

SMA Negeri yang berlokasi di Pulau Pangkil, Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau, ini berada di zona kuning dalam masa pandemi COVID-19. Alhasil, SMAN 2 Teluk Bintang harus menerapkan Protokol Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran dari Gubernur Maupun Instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan. "Pembelajaran Daring sudah kami mulai pada 17 Maret 2020 dan berlanjut pada tahun pelajaran baru," ujar Martelia Puspa, Kepala SMAN 2 Teluk Bintang.

Berada di Pulau Pangkil yang terpisah dari Bintang, pemberlakuan PSBB membuat warga SMAN 2 Teluk Bintang bekerja ekstra. Misalnya, karena guru banyak yang tinggal di darat (Tanjung Pinang dan Bintang) di dalam transportasi laut (Pompong), yang semula terisi 8 orang hanya bisa diisi 4 orang, sehingga pengaturan jadwal keberangkatan harus disesuaikan kembali, dan untuk siswa yang datang ke sekolah memang sudah diwajibkan untuk menggunakan masker.

Untuk pembelajaran daring selama COVID-19 pada tahun pelajaran 2019-2020 sudah dimulai Maret-

Juni. Dan memasuki tahun pelajaran baru 2020/2010, sesuai Surat Edaran Gubernur bahwa Kepulauan Riau belum 100% zona hijau maka sekolah tetap belajar dari rumah. Namun untuk guru dan karyawan 75% dari jumlah seluruh pegawai untuk dapat kerja dari kantor (Work From office), artinya siswa di rumah dan guru/karyawan untuk hadir ke kantor. "Tentu saja dengan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat," kata Martelia.

Pembelajaran daring di SMAN 2 Teluk Bintang masih tetap dilaksanakan selama COVID-19 belum berakhir atau masih dalam zona kuning atau merah. Sistem yang dilakukan selama daring ini tetap mengikuti jadwal Kurikulum. Aplikasi yang digunakan selama daring yakni grup Whatsapp, Aplikasi Zoom, dan download materi pembelajaran dari video Youtube.

Menurut Martelia, memang harus diakui juga tidak bisa memaksakan

TAHUN PEMBELAJARAN BARU



ketercapaian kurikulum dalam hal ini, mengingat kondisi dan posisi siswa yang berada di pulau. "Dengan mereka mengikuti dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru merupakan suatu hal yang membahagiakan kami selaku guru, semangat mereka tidak surut untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka," ujarnya. Namun, Martelia menambahkan, kendala yang dialami SMAN 2 Teluk Bintang yang berada di pulau antara lain mulai dari kurang baiknya sinyal internet, siswa yang tidak punya HP Android, serta tidak ada dana untuk membeli paket internet. "Namun pengalaman kami, alhamdulillah siswa tetap aktif mengikuti mulai dari proses belajar-mengajar dan pesantren Ramadhan selama puasa lalu," jelasnya.



**Armis**  
KEPALA SMAN 2  
LINGGOSARI BAGANTI

### SMAN 2 Linggosari Baganti, Sumbar

Sekolah yang berlokasi di Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir, Provinsi Sumatera Barat ini beruntung wilayahnya bukan merupakan zona merah. Bahkan tak ditemukannya pasien positif COVID-19 membuat Kabupaten Pesisir merupakan zona hijau.

Meski demikian, sebagai bentuk pencegahan, menyesuaikan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pada periode Maret- Juni 2020 atau tiga bulan di penghujung semester genap, SMAN 2 Linggosari Baganti melaksanakan pembelajaran jarak jauh. "Selama Maret hingga Juni, kami menerapkan pembelajaran daring," ujar Kepala SMAN 2 Linggosari Baganti, Armis.

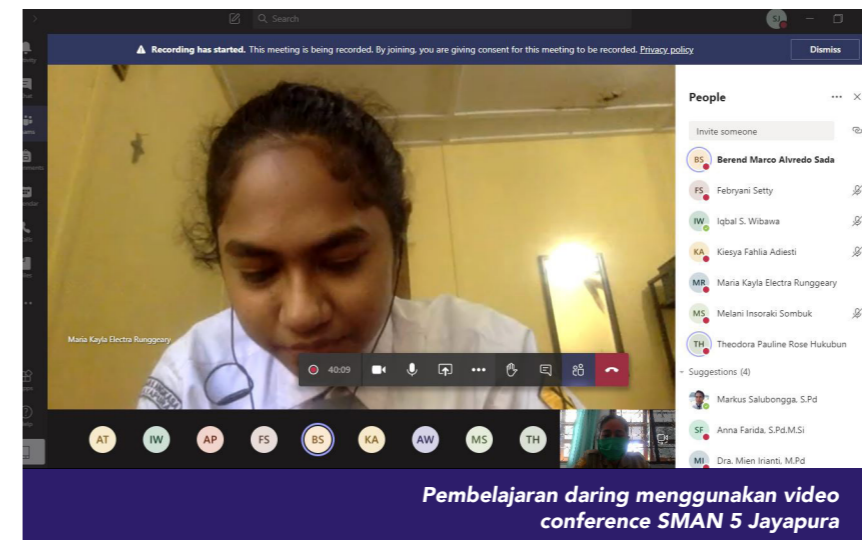
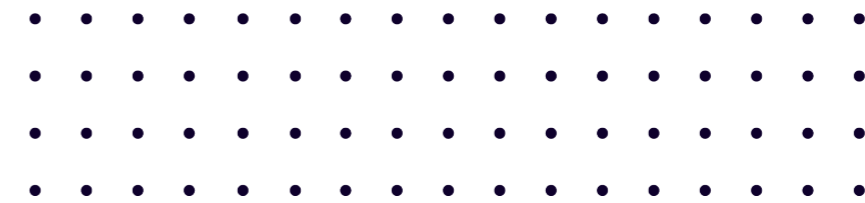
Pembelajaran daring saat ada PSBB, menurut Armis, secara umum berjalan dengan cukup baik. "Meski misalnya banyak kendala yang dihadapi, mulai dari keterbatasan akses internet, keterbatasan gadget, dan kemampuan siswa untuk membeli paket data yang terbatas," ujarnya.

Bagaimana dengan tahun pelajaran baru? Menurut Armis pihaknya telah melakukan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, meski sudah dinyatakan masuk zona hijau, pihak sekolah tetap ketat menerapkan prosedur dan ketetapan pencegahan COVID-19. Mulai dari pemakaian masker, penyediaan sarana prasarana cuci tangan berupa wastafel dilengkapi sabun cuci tangan, hand sanitizer, menjaga jarak, dan peserta didik serta GTK membawa makanan dan minuman dari rumah.

"Kami juga tidak 100 persen masuk. Sebagaimana edaran dari Kemendikbud, untuk pelaksanaan tatap muka hanya 50 persen. Jadi kami kombinasi, 50 persen tatap muka dan 50 persen lagi belajar di rumah atau daring. Jadi saling bergantian," ungkap Armis.



**Pengecekan suhu tubuh bentuk protokol kesehatan di SMAN 2 Linggosari Baganti**



**Jil**  
WAKIL KEPALA SEKOLAH  
BIDANG KURIKULUM  
SMAN 5 JAYAPURA

### SMAN 5 Jayapura, Papua

Kota Jayapura di Provinsi Papua menjadi salah satu kota yang terkonfirmasi masuk zona merah COVID-19. Kondisi ini berimbas pada penyelenggaraan pembelajaran sekolah, termasuk SMAN 5 Kota Jayapura. Terlebih saat Kota Jayapura menerapkan kebijakan PSBB.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, menurut Kepala SMAN 5 Jayapura Juwita A.R.E Robot, pada tahun pelajaran baru 2020-2021 sekolah memberlakukan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) sebagaimana dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua pada bulan Juni lalu. "Sementara sebelum tahun ajaran baru kami menerapkan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan fasilitas WA, email, pesan singkat, dan telepon," ujar Juwita.

Pada tahun ajaran baru, sebagaimana dikemukakan Waka Kurikulum SMAN 5 Jil, kebijakan yang diterapkan SMAN 5 Jayapura dengan sistem daring yakni siswa mengikuti pembelajaran dari rumah sesuai dengan imbauan dan arahan dari

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

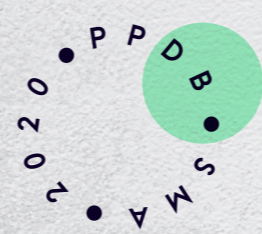
Secara teknis, lanjut Jil, SMAN 5 pada tahun pelajaran baru menggunakan Microsoft 365 sebagai platform pembelajaran daring. "Diharapkan M365 mampu menciptakan sekolah virtual yang menjamin ketersediaan pendidikan bagi peserta didik SMAN 5," ujarnya. Namun kendala yang mungkin dihadapi siswa, adalah kurangnya sarana laptop atau HP Android serta akses internet. "Selain itu, pendampingan dan pelatihan lebih lanjut untuk menggunakan aplikasi ini masih harus dilakukan baik kepada siswa maupun guru," jelasnya.

Ke depan, jika kegiatan sekolah sudah dimungkinkan untuk tatap muka SMAN 5 Jayapura akan menerapkan protokol kesehatan sesuai standar yang sudah ditentukan secara nasional yaitu, penyediaan masker, hand sanitizer, face shield, tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh dan penerapan 40 persen jumlah peserta didik dari jumlah kelas normal dalam satu ruang kelas," jelas Jil.

**TAHUN PEMBELAJARAN BARU**  
**TAHUN PEMBELAJARAN BARU**



EVALUASI PPDB TAHUN 2020



# Pusat dan Daerah harus Bekerja Sama

**Direktorat SMA melakukan pemantauan dan menilai kinerja pelaksanaan PPDB tahun 2020. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa permasalahan yang mesti diselesaikan bersama dengan pemerintah daerah.**

**B**agi sebagian orangtua, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan sekadar ritual mengantarkan sang buah hati memasuki sekolah baru atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian dari mereka percaya, keberhasilan memasukkan anak mereka ke sekolah dengan label favorit menjadi bagian dari kesuksesan anak di masa depan.

Pandangan yang tak sepenuhnya benar ini menyebabkan banyak orang tua rela "berebut" menyekolahkan anak mereka ke sekolah favorit. Temuan ini mengemuka pada Webinar Koordinasi dengan Pemerintah Daerah bertema Evaluasi PPDB dan Persiapan Tahun Ajaran 2020/2021 Jenjang Pendidikan SMA yang diselenggarakan Direktorat SMA Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud, pertengahan Juli 2020.

Menurut pandangan pengamat pendidikan Itje Chodijah munculnya masalah ini disebabkan adanya "kastanisasi sekolah", fenomena ini terus terawat karena pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan pendidikan di sekolah-sekolah favorit saja. Meskipun tidak tertulis, adanya "kasta" sekolah favorit ini juga menyebabkan kepala daerah tergiur membuat sekolah semacam ini sebagai etalase daerahnya. Hal ini membuat perhatian kepala daerah kepada sekolah-sekolah lainnya tidak optimal, padahal, fakta di lapangan menunjukkan, selain kualitas, sebaran sekolah di daerah juga belum merata. Bahkan, masih ada kecamatan yang belum memiliki SMA.

Permasalahan lainnya yang juga muncul ketika PPDB adalah belum detailnya data pemetaan wilayah yang seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini cukup menghambat proses PPDB melalui jalur zonasi yang mensyaratkan sekolah negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Metode ini menggunakan radius terdekat dengan titik pusat zona pada masing-masing jenjang pendidikan yang memenuhi akreditasi A atau B di atas rata-rata nasional.

Menurut Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Muliana Girsang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemendikbud dalam implementasi zonasi, menunjukkan pemerintah daerah tidak menghitung terlebih dulu jumlah kebutuhan dalam penetapan zonasi. Selain itu, banyak temuan calon peserta didik yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah tidak lolos, sementara yang jauh justru diterima. Selain itu, banyak pemalsuan kartu keluarga (KK).

Permasalahan berikutnya yang juga menghambat proses PPDB adalah keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik. Di tengah Pandemi COVID-19, penyelenggaraan PPDB melalui jalur daring, luring, dan campuran. Sebagaimana disebutkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, ada 14 provinsi yang melakukan PPDB secara daring. Beberapa provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat.

la menambahkan sebanyak 19 provinsi lain akan melaksanakan proses pendaftaran secara campuran daring dan luar jaringan (luring), atau secara langsung, dengan mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Sementara provinsi Papua hingga bulan Mei merupakan satu-satunya yang belum melaporkan keputusan pelaksanaan PPDB secara daring maupun luring.

Permasalahan yang juga cukup menghambat PPDB adalah keterbatasan pemahaman orangtua dan calon siswa dalam mengisi formulir PPDB. Hal ini menyulitkan calon siswa saat melakukan proses pendaftaran secara daring. Sangat mungkin hal ini disebabkan belum optimalnya sosialisasi terkait PPDB, terutama di beberapa pulau terpencil dimana jarak antar pulau yang jauh, sarana transportasi serta akses internet sangat terbatas. Keterbatasan ruang kelas, juga menjadi bagian dari permasalahan yang muncul saat PPDB tahun 2020. Akibat kondisi ini, masih ada calon siswa yang tidak dapat masuk di sekolah yang terdekat dengan rumahnya.

### Solusi tindak lanjut

Dalam webinar juga disepakati beberapa solusi atau tindak lanjut atas beberapa permasalahan terkait pelaksanaan PPDB tahun 2020. Beberapa kesepakatan itu adalah kesediaan pemerintah daerah

berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui pembagian zona, serta membuat kesepakatan tertulis untuk kabupaten/kota yang saling berbatasan.

Untuk meningkatkan pemahaman orangtua dan calon siswa dalam mengikuti proses PPDB, maka kegiatan sosialisasi PPDB akan dilakukan sejak di kelas 9 SMP/MTS dan sederajat. Kegiatan ini selain untuk mengenalkan jalur penerimaan peserta didik yang ditetapkan juga untuk menyosialisasikan cara pengisian formulir pendaftaran PPDB daring.

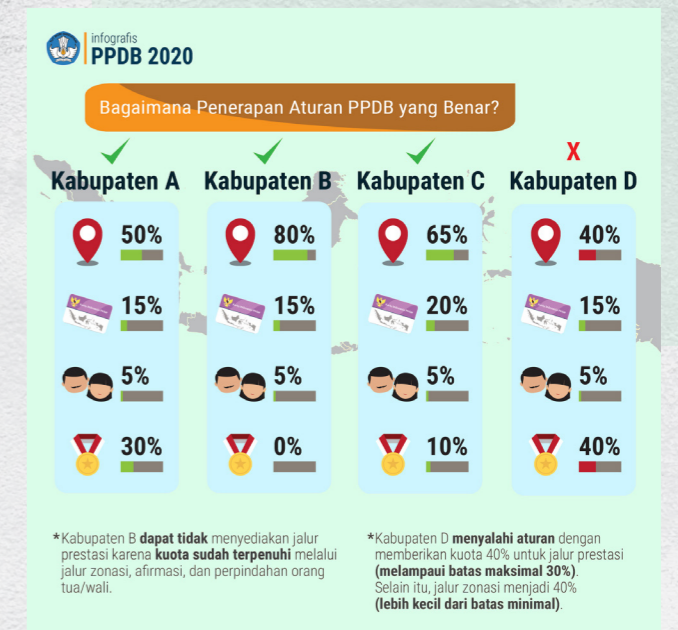
Sebagai upaya untuk pemeratakan kualitas sekolah dan menghapus label sekolah favorit, pemerintah daerah sepakat untuk segera memetakan kebutuhan untuk pembangunan SMA Negeri di kecamatan yang belum memiliki SMA dan menyesuakannya dengan minat dari warga masyarakat setempat.

Sementara bagi daerah-daerah yang melaksanakan PPDB secara luar jaringan (luring) dengan metode tatap muka, maka penyelenggaraannya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencegah terjadinya kerumunan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

Khusus untuk penyelenggaraan PPDB di daerah terpencil, Dinas Pendidikan Provinsi mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi proses PPDB dan berkoordinasi dengan perangkat daerah di wilayah tersebut. Dinas Pendidikan Provinsi juga harus turut bertanggungjawab menyalurkan siswa yang belum tertampung. Hal ini sejalan dengan kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengelola sistem pendidikan agar setiap anak dapat mengakses pendidikan bermutu dan sistem yang berkeadilan sosial. ●



Verifikasi data peserta didik baru di SMAN 1 Sebatik menerapkan protokol COVID-19





## PEMBELAJARAN BERGILIR

# Sebuah Gagasan Belajar di Masa Pandemi COVID-19



Syahdian  
KASI FPMP LPMP  
SUMATERA UTARA

**Pandemi COVID-19 telah mengubah cara pembelajaran yang tadinya konvensional dengan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Beragam cara digunakan, mulai tatap layar dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, menggunakan modul pembelajaran yang dikirim ke rumah siswa, hingga yang menggunakan aplikasi pembelajaran seperti: Rumah Belajar, Sipintar, Google Class Room, Quipper, Quisis, Wekiddo, Edmodo, e-modul, Sekolahmu, Microsoft Team Classroom.**

Pada praktiknya memang tidak semuanya berjalan mulus. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran ada kalanya terkendala oleh daya dukung. Mulai dari keterbatasan perangkat, jaringan internet dan listrik, kemampuan guru dan siswa menggunakan aplikasi, termasuk keterbatasan finansial. Namun, terlepas dari berbagai persoalan tersebut, ada hal yang paling penting yakni menjaga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Mengembalikan pembelajaran sebagaimana dalam kondisi normal memang belum memungkinkan. Ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir menjadi penyebab. Barangkali satu-satunya pilihan saat ini adalah "berdamai" dengan virus ini. Caranya adalah dengan menjalankan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh.

Pembelajaran tatap muka secara normal diyakini dapat membelajarkan karakter baik pada peserta didik melalui pemodelan oleh guru dan tenaga kependidikan maupun antar sesama teman sebaya. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 memang sangat membantu menjaga kesinambungan pembelajaran siswa, namun praktiknya

belum maksimal menanamkan nilai-nilai karakter, termasuk juga sejumlah keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk bekal hidupnya.

## Pembelajaran Bergilir

Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 dan rencana dibukanya kembali pembelajaran secara normal, tentu diperlukan strategi khusus, terutama bagaimana mencegah penyebaran virus. Berkaitan dengan hal ini, siswa sebagai subjek dan objek dalam proses pembelajaran di sekolah belum tentu memiliki pemahaman yang memadai tentang pandemi COVID-19, pencegahan dan dampaknya. Menghadapi kondisi semacam ini, sekolah harus memiliki kebijakan yang tepat untuk memastikan semua peserta didik dapat memahami protokol pencegahan COVID-19, termasuk mempersiapkan semua sarana yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan seperti sabun, air yang mengalir, *hand sanitizer*, masker dan sarana pendukung lainnya.

Tentu, upaya mendisiplinkan semua warga sekolah untuk dapat menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus corona bukan perkara mudah. Dengan jumlah peserta didik yang banyak, sudah pasti membutuhkan penanganan yang ekstra juga ke-sigapan guru dalam memonitoring dan mengawasi siswanya. Bagi siswa yang sudah remaja seperti siswa SMP, SMA dan SMK mungkin pemahaman tentang pandemi COVID-19 bisa lebih mudah jika proses sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun bagaimana dengan siswa PAUD dan SD? Jelas membutuhkan pendampingan yang terus menerus jika proses pembelajaran dilakukan secara normal.

Begitu kompleksnya permasalahan yang berpotensi muncul saat pembelajaran tatap muka, menunjukkan perlunya pengaturan atau kebijakan tepat terutama untuk memastikan warga sekolah benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Satu ide yang dapat diterapkan sekolah adalah menerapkan kebijakan pembelajaran bergilir.

Pembelajaran bergilir adalah sebuah upaya mengatur jadwal masuk sekolah agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah. Kebijakan ini menjadi jalan tengah agar pembelajaran tatap muka dapat diselenggarakan namun tetap melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 karena dalam pelaksanaannya tetap diselingi dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Sebagai contoh, di satuan pendidikan jenjang SMA. Untuk Senin dan Selasa hanya siswa kelas X yang boleh masuk sekolah. Kemudian Rabu dan Kamis giliran siswa kelas XI yang masuk sekolah, dan Jumat sampai Sabtu, giliran siswa kelas XII yang masuk sekolah. Dengan pembagian seperti ini, maka, siswa di setiap kelas dapat disebar ke beberapa kelas sehingga penerapan *physical distancing* akan lebih efektif. Bagaimana dengan gurunya? Jadwal guru pun diatur sedemikian rupa sehingga guru yang mengampu mata pelajaran tidak lagi terfokus pada angkatan siswanya (kelas X, XI atau XII), tetapi fokus pada mata pelajaran siswanya yang belajar pada hari itu. Guru harus mengajar sesuai jadwal pelajaran di kelas. Pada

satu sesi, ada tiga orang guru yang mengajar di tiga kelas yang berbeda. Bagi siswa yang tidak mendapatkan giliran belajar di sekolah dapat mengerjakan tugas atau pembelajaran dengan metode dan strategi yang sesuai dengan kemampuan guru, atau bisa juga mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran bergilir setidaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bersosialisasi meskipun di masa pandemi COVID-19. Secara tidak langsung, pendekatan ini juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi komponen-komponen lain yang terkait dengan aktivitas persekolahan.

Apapun kebijakan yang akan diambil pemerintah khususnya dalam menghadapi tahun pelajaran baru 2020/2021, sebaiknya sebelum diterapkan perlu ada kajian yang mendalam agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pembelajaran bergilir merupakan kebijakan transisi sampai keadaan benar-benar kembali normal. Dengan cara seperti ini diyakini harapan Presiden RI, berdamai dengan virus Corona tetapi tetap waspada dan tidak menyerah dapat terwujud. ●



## FLEKSIBILITAS BOS

# Boleh Fleksibel Mengelola Dana BOS



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan fleksibilitas dan otonomi pada kepala sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Kebijakan ini untuk mendukung pembelajaran di tengah pandemi COVID-19.**



**D**i masa pandemi, kepala sekolah punya kewenangan lebih untuk mengelola dana BOS sesuai kebutuhan. Namun, masih ada sejumlah kepala sekolah yang tidak percaya diri. Kondisi ini disebutkan Mendikbud Nadiem Makarim, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi kebijakan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Kebijakan baru ini memberi fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah mengatur pemakaian BOS untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Hamid Muhammad menjelaskan, Permendikbud ini memberikan kewenangan lebih banyak kepada para kepala sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS Reguler. Dengan otonomi yang diatur oleh Permendikbud tersebut, kepala sekolah dapat lebih leluasa mengalokasikan dana BOS sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Dalam pasal 9 misalnya disebutkan pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau siswa dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun terkait soal ini, Hamid menegaskan, pada dasarnya Kemendikbud tidak mewajibkan sekolah atau satuan pendidikan membeli pulsa atau paket data untuk menunjang pembelajaran secara daring.

"Kelenturan" lainnya juga terlihat dari kewenangan kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dan pembelian penunjang kesehatan di sekolah seperti pembelian cairan atau sabun pembersih

tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Untuk pengelolaan dana BOS secara terbuka yang melibatkan pengelola sekolah, kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab. Acuan-nya tetap menggunakan 12 komponen penggunaan dana BOS. Selain alokasi, batasan-batasan persentase penggunaan dana BOS yang selama ini telah diatur, juga telah dilepas dan diserahkan kepada kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai keperluan sekolah masing-masing.

"Daftar alokasi penggunaannya sudah ada, hanya saja persentase penggunaan menjadi kewenangan penuh kepala sekolah dengan menyesuaikan keperluan sekolah masing-masing," jelas Hamid.

Ia mencontohkan, penggunaan dana untuk membayar honor guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), misalnya. Persentasenya tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen alias bisa lebih. Jadi kalau di satu sekolah memerlukan dana lebih dari 50 persen untuk membayar guru honorer yang mengajar ke rumah-rumah, dalam aturan baru itu masih diperbolehkan.

Selain besaran persentase, syarat bagi guru honorer yang menjadi penerima juga dibuat lebih fleksibel. Kini, guru

yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pun boleh menerima alokasi dana dari BOS. Meski demikian, Hamid menegaskan, guru honorer tetap harus terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019 dan belum mendapat tunjangan profesi, serta memenuhi beban mengajar.

## Penyesuaian RAKS

Agar dapat menggunakan dana BOS sesuai kebijakan baru, maka sekolah harus merevisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) terlebih dahulu. Hamid juga meminta setiap sekolah segera menyesuaikan atau merevisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). "Saya harapkan semua sekolah segera gunakan BOS Reguler sesuai dengan yang ada di RKAS, atau RKAS yang sudah direvisi," katanya.

RKAS ini juga harus disetujui Dinas Pendidikan setempat, agar dana BOS dapat dicairkan dan digunakan. Soal mekanisme pengubahan RKAS, menjadi kewenangan masing-masing dinas pendidikan. Di Klaten misalnya, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Klaten Wardani Sugiyanto mengatakan, pengubahan RKAS dilakukan melalui aplikasi yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD). "Hal tersebut memudahkan kontrol pemasukan, perencanaan, penggunaan, dan pengawasan," kata Wardani.

Pencairan dana BOS, lanjut Hamid, menjadi kewenangan Kementerian Keuangan dimana penyalurannya melalui pemerintah daerah. Hingga kini, penyaluran dana BOS tahap I sudah mencapai 99,5 persen. Sisanya masih dalam proses verifikasi data, terutama sekolah-sekolah di Indonesia Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun penyalurannya BOP PAUD dan Kesetaraan sudah sekitar 48 persen. Selebihnya masih dalam proses. Penyaluran BOS tahap II direncanakan dilakukan pada Mei.

Untuk menjaga penggunaan dana BOS agar tepat sasaran, Hamid Muhammad menyatakan bahwa kepala sekolah sudah memahami mekanisme dan segala konsekuensinya. Sistem pelaporan BOS juga terus menerus dikembangkan. Meski fleksibel, pihaknya tidak membenarkan jika penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran. "Para kepala sekolah harus dapat mempertimbangkan dan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas untuk menyelenggarakan pembelajaran selama masa darurat," ujarnya. ●



**Dengan otonomi yang diatur oleh Permendikbud tersebut, kepala sekolah dapat lebih leluasa mengalokasikan dana BOS sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.**





# Sarana Penunjang Belajar Tatap Muka di Masa Pandemi

**Pembukaan sekolah di zona hijau sudah mulai dilakukan pada tahun pelajaran 2020/2021, guna melaksanakan pembelajaran tatap muka yang aman, sekolah harus memenuhi kriteria yang ditentukan.**

**W**abah COVID-19 yang terjadi akhir tahun 2019 lalu di dunia hingga kini belum berakhir. Indonesia sejak Bulan Maret lalu sudah melaporkan terdapat kasus COVID-19, tentu ini berpengaruh pada semua lini, termasuk pendidikan. Sejak pemerintah mengumumkan kasus COVID-19, dan terus bertambah hari ke hari, pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan kegiatan dari rumah. Mendikbud merespons dengan mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Masih karena pandemi ini juga, Mendikbud memutuskan untuk meniadakan UN, dari yang tadinya tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan UN, menjadi tidak dilaksanakan sama sekali.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kasus COVID-19 yang mulai menunjukkan titik terang meski penambahan kasus masih tinggi, namun pemerintah sudah dapat memetakan daerah-daerah mana saja yang menjadi kluster tinggi kasus COVID-19 dan daerah mana saja yang masih dinyatakan aman dari COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah melalui Gusus Tugas Penanganan COVID-19 memetakan dan mengelompokkan daerah-daerah pada beberapa zona warna, dengan zona hijau untuk daerah yang dianggap aman COVID-19 yang kemudian dijadikan rujukan untuk kehidupan masa pandemi atau dikenal dengan adaptasi kebiasaan baru yang populer dikenal dengan sebutan *new normal*. Berdasarkan pada data yang dihimpun dari gugus tugas, per tanggal 6 Juli 2020, terdapat 99 Kabupaten/ Kota yang masuk dalam kategori Zona Hijau.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, pemerintah wilayah zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi seluruh daftar periksa dan merasa siap. Proses pembelajaran tatap muka di zona hijau yang dilaksanakan mulai tahun pelajaran baru 2020/2021 ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri yaitu

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, untuk sekolah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah masih berdasarkan SKB 4 Menteri tersebut dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar dari Rumah.

## Pandemi dan Sarana Sanitasi Sekolah

Dalam membuka satuan pendidikan di masa pandemi seperti ini tentu perlu persiapan matang dan terdapat prasyarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Meski terdapat di zona hijau COVID-19, bukan berarti satuan pendidikan bebas dari risiko terkena COVID-19, tetapi masih mungkin terpapar COVID-19, maka protokol kesehatan tetap harus dijalankan oleh seluruh satuan pendidikan di zona hijau.

Satuan pendidikan di zona hijau harus mempersiapkan hal-hal penunjang belajar yang sesuai dengan protokol kesehatan, Dhany Hamiddan Khoir (Koordinator Sarana dan Prasarana Direktorat SMA) dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2020/2021 yang dilaksanakan secara daring memaparkan bahwa dalam mempersiapkan pembukaan sekolah, kepala satuan pendidikan setidaknya bertanggungjawab terhadap empat hal yaitu; (1) Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui Dapodik, meliputi: a) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, (b) mampu mengakses pelayanan kesehatan, (c) menerapkan area wajib masker, d) memiliki *thermogun*, e) memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah; (2) Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua /wali peserta didik; (3) Membuat RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan; (4) Menginformasikan kepada dinas pendidikan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkontaminasi atau dinyatakan positif COVID-19.

Lalu, sarana apa saja yang harus dipersiapkan satuan pendidikan dalam persiapan belajar? Masih dipaparkan oleh Dhany Hamiddan Khair, satuan pendidikan harus memiliki; (1) tempat cuci tangan, baik permanen maupun portabel, (2) sabun cuci tangan yang cukup untuk seluruh warga sekolah, (3) Masker, wajib dikenakan oleh seluruh warga sekolah, (4) Cairan desinfektan yang mencukupi untuk penyemprotan secara berkala, (5) *Face Shield* (tidak wajib, namun disarankan untuk guru), (6) Alat semprot cairan desinfektan, (7) Thermogun (wajib ada dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan), (8) Alat kebersihan, (9) Bahan sosialisasi berupa poster/spanduk.

Seluruh persiapan dilakukan sebaik-baiknya oleh satuan pendidikan guna menciptakan sekolah aman di masa *new normal*, diharapkan dengan ketatnya protokol kesehatan di satuan pendidikan tidak menambah angka COVID-19 di Indonesia. Semoga ini awal yang baik dan ke depan zona hijau semakin luas, sehingga lebih banyak lagi sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Semoga! ●

SEKOLAH  
YANG  
BERSIH





# Kunci Sekolah Aman di Masa *New Normal*

**Satuan pendidikan di zona hijau sudah mulai berbenah dan mempersiapkan diri menuju sekolah di masa new normal, protokol kesehatan sudah disusun untuk segera dipersiapkan oleh satuan pendidikan.**

**P**andemi belum juga berakhir, namun ada daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona hijau dan seluruh lininya mulai bersiap untuk dapat hidup kembali setelah pandemi atau biasa disebut dengan masa adaptasi kebiasaan baru dan beberapa menyebutnya dengan istilah *new normal*. Begitupun dengan satuan pendidikan, optimalisasi peran UKS terus ditingkatkan guna mempersiapkan pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru.

Beberapa sekolah di zona hijau pada tahun ajaran 2020/2021 akan melakukan sekolah tatap muka dengan berbagai prosedur kesehatan. Salah satunya adalah seluruh warga sekolah harus melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Secara umum, manfaat PHBS adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat, dalam pembahasan ini adalah warga sekolah. Manfaat PHBS di sekolah secara khusus yakni sekolah mampu

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, dan para siswa, guru hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Kampanye mengenai PHBS di sekolah dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah atau yang lebih dikenal dengan UKS.

UKS merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 79 bahwa "Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui UKS, diharapkan juga dapat memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah mengenai dan apa saja yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19 ini.

## UKS dan PHBS

Ruang lingkup dan tujuan UKS mengarah pada PHBS di sekolah, karena dilakukan secara bersama oleh seluruh warga sekolah mempraktikkan PHBS dengan penuh kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran, maka sekolah dapat secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.

Kemenkes dalam laman websitenya menyebutkan, terdapat 8 indikator PHBS di sekolah, diantaranya adalah:

- Menyuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun.
- Mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah.
- Menggunakan jamban yang bersih dan sehat.
- Olahraga yang teratur dan terukur.
- Memberantas jentik nyamuk.
- Tidak merokok di sekolah.

- Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan.
- Membuang sampah pada tempatnya.

Dalam kaitannya dengan pandemi dan kesiapan satuan pendidikan dalam adaptasi kebiasaan baru, dalam Webinar yang dilaksanakan oleh Direktorat SMA, Koordinator Bidang Peserta Didik, Juandanilisyah dalam paparannya menyebutkan terdapat beberapa perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan, diantaranya adalah (1) Menggunakan masker kain tiga lapis, atau dua lapis dengan didalamnya dilapisi tisu yang diganti empat jam sekali, (2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir, (3) menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak seperti bersalaman dan cium tangan, dan (4) menerapkan etika batuk/bersin dengan menutup menggunakan lengan.

Selain itu, masih dalam paparannya, Juandanilisyah pun menyebutkan terdapat beberapa anjuran selama masa adaptasi kebiasaan baru di sekolah, diantaranya adalah (1) menggunakan peralatan makan dan minum sendiri, (2) membawa alat tulis sendiri, (3) membawa perlengkapan ibadah sendiri.

Penerapan PHBS di sekolah tentu membutuhkan intervensi UKS sebagai garda depan usaha menjaga kesehatan sekolah dan warganya, selain itu juga diperlukan penguatan kesadaran hidup sehat dari orang tua dan guru, bahkan bukan hanya orang tua dan guru yang semestinya terlibat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang berada di sekitar sekolah untuk dapat ikut serta menerapkan PHBS di tingkat masyarakat, agar bukan lingkungan sekolah saja yang sehat, tetapi juga lingkungan masyarakat di sekitar sekolahpun sehat.

Hal ini merupakan sebuah upaya dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 yang dilakukan di satuan pendidikan. Semoga pandemi cepat berakhir, keadaan berangsur membaik seperti sedia kala, dan PHBS tetap dilakukan meski pandemi telah berakhir. ●





*Dra Augustin Wardhani*

**PERENCANA AHLI MUDA, DIREKTORAT SMA**

# SMA, Jalan Menyiapkan Generasi Unggul

**Melalui jenjang pendidikan SMA, peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menggali, mengolah, dan menggunakan informasi yang dimuat dalam berbagai bahan kajian dan pelajaran melalui pemikiran dan diskusi rasional.**

Setiap tahun, lulusan sekolah menengah (SMA dan SMK) tercatat ada sekitar 3,7 juta orang. Ke mana mereka selanjutnya? Tentu ada yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun ada juga yang langsung terjun ke dunia kerja. Seberapa besar komposisinya? Menurut data dari Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah lulusan sekolah menengah tak sebanding dengan daya tampung di perguruan tinggi sebanyak 1,9 juta orang per tahun.

Sementara di dunia kerja, kondisi angkatan kerja di Indonesia belum mengalami perbaikan. Se-

banyak 25% angkatan kerja merupakan lulusan sekolah menengah. Tentu pemerintah tak tinggal diam. Kondisi ini disikapi dengan membenahi kapasitas perguruan tinggi, baik taraf universitas atau politeknik. Untuk peningkatan daya tampung politeknik, misalnya, pemerintah telah menyusun rencana periode 2020-2024 membangun Politeknik khusus untuk bidang-bidang yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan sesuai dengan kebutuhan industri di setiap kawasan.

Langkah tersebut tentu harus mendapat dukungan. Apalagi jika kita melihat kenyataan bahwa perkembangan dunia industri, teknologi informasi, dan

komunikasi telah membuat dunia kerja berkembang begitu pesat. Akibatnya kompetensi yang dibutuhkan pun makin tinggi sehingga lapangan kerja khususnya yang membuka peluang untuk lulusan sekolah menengah makin sulit.

## Peran Pendidikan Menengah

Langkah yang dirancang Kemendiknas dan Kemendikbud tersebut tentu akan membuka peluang besar bagi lulusan sekolah menengah untuk bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan besar bagi penyelenggara sekolah menengah, khususnya sekolah menengah atas (SMA) untuk dapat mendorong para peserta didiknya agar bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

Peran yang sejatinya bukan hal yang baru. Satuan pendidikan jenjang SMA hanya perlu merevitalisasi fungsi dan perannya dalam mendukung program pemerintah menyiapkan generasi yang berkualitas dan menjadi manusia seutuhnya. Karena SMA pada hakikatnya merupakan satuan pendidikan yang berfungsi untuk menyelenggarakan "pendidikan bersifat umum". Maksud dari Bersifat umum yaitu pendidikan yang menyediakan kurikulum dengan sejumlah bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan "the student's rational thought and general intellectual capabilities".

Melalui pendidikan umum, peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menggali, mengolah, dan menggunakan informasi (*well informed person*) yang dimuat dalam berbagai bahan kajian dan pelajaran melalui pemikiran dan diskusi rasional. Ilmunya yang didapat cukup general memberikan lebih banyak kesempatan untuk 'mendalami' bidang-bidang baik di Perguruan Tinggi maupun di Masyara-

kat. Dengan demikian, pendidikan bersifat umum berbeda dengan pendidikan yang menekankan pada sifat profesional, vokasional, dan teknikal. Dalam konteks universal, bahan kajian dan pelajaran bagi satuan pendidikan bersifat umum (*liberal arts education*) dikelompokkan ke dalam bidang keilmuan: *Humanities* (Humaniora); *Language & Arts* (Bahasa dan Seni); *Mathematics* (Matematika); *Natural Sciences* (Ilmu-ilmu Alam); dan *Social Sciences* (Ilmu-ilmu Sosial).

Dengan bekal pendidikan bersifat umum tersebut, rumusan fungsi dan tujuan SMA dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.

Rumusan tujuan ini sejalan dengan perkembangan diri dari siswa di jenjang pendidikan menengah atas di mana mereka masuk dalam kelompok remaja dengan rentang usia 16-18 tahun (peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa). Dalam masa ini sudah muncul kesadaran siswa untuk membina hubungan sosial dengan lingkungannya serta ada kebutuhan berprestasi atau need of achievement karena didorong keinginan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis.

Dengan bekal pemahaman pendidikan umum ini maka tujuan penyelenggaraan sekolah menengah dalam meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi

akan lebih mudah terpenuhi. Di lain pihak, bekal tersebut juga akan meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Inilah tugas besar pendidikan jenjang SMA yang harus kita kawal. Tak hanya mendorong para siswa menjejakkan ke jenjang pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya ●





SMAN 1 GORONTALO

# Optimalkan Gawai Siswa Jadi Pandai



SMAN 1 GORONTALO

**Dengan mengoptimalkan gawai, antusiasme siswa dalam pembelajaran digital meningkat. Secara tidak sadar mereka menambah ilmu dengan cara yang menyenangkan.**



Upaya bertahap menuju era digital, terus dipersiapkan oleh SMAN 1 Gorontalo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mampu menggunakan perangkat teknologi informasi. Mulai dari yang paling sederhana. Kini hampir 99% pendidik di SMAN 1 Gorontalo dapat menggunakan aplikasi komputer, meski baru aplikasi dasar seperti Ms. Word, Ms. Excel, dan Ms. Powerpoint. Aplikasi ini membantu para pendidik untuk menyiapkan rencana dan kegiatan pembelajaran.

Sejalan dengan visinya dalam mewujudkan insan Indonesia yang unggul, mandiri, kompetitif, berwawasan IPTEK dan IMTAQ, berpijak pada nilai-nilai karakter dan budaya bangsa, serta mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. Sekolah ini telah melakukan berbagai upaya diantaranya menjadikan SMA berbasis digital.

Menurut Basri Imara, Kepala SMAN 1 Gorontalo, SMA Digital adalah sekolah yang mengimplementasikan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan IT. Semua stakeholder juga guru menggunakan teknologi digital seperti laptop atau komputer, LCD, dan jaringan internet untuk mengakses materi yang diinginkan.

Dengan pembelajaran berbasis digital memudahkan pendidik memberikan gambaran kepada siswa, misalnya untuk materi respirasi pada pelajaran biologi, siswa dapat melihat simulasinya. Dengan ini dapat memudahkan mereka belajar. Meski banyak kemudahan yang didapat dari implementasi pembelajaran berbasis digital, namun tetap ada efek negatifnya. Misalnya, pada saat guru mengajar, ada siswa yang menyalahgunakan gawainya untuk bermain game. Begitu juga dengan pembelajaran digital yang dilakukan di rumah, seringkali game membuat siswa tidak fokus belajar, disinilah peran orang tua menjadi penting.

Guna meminimalisir hal-hal negatif yang mungkin terjadi, sekolah memberikan informasi kepada guru mengenai pemanfaatan gawai yang benar untuk pembelajaran. Selain itu, disampaikan juga kepada siswa mengenai dampak negatif dari terlalu banyak bermain game menggunakan gawai. "Kami lakukan upaya edukasi ini secara terus-menerus, bahkan kami sampaikan setiap upacara bendera" tutur Basri.

## Layanan Administrasi Sekolah

Layanan administrasi sekolah di SMAN 1 Gorontalo masih memanfaatkan sistem dapodik. Ini sudah menyediakan informasi yang dibutuhkan sekolah seperti dana kesiswaan, dana BOS. Kami selama dua tahun terakhir memperoleh penghargaan dalam hal penanganan data khususnya memanfaatkan dapodik secara tertib.

Dalam proses pembelajaran, semua guru wajib memiliki laptop, apabila laptop bermasalah maka guru dapat menggunakan laptop atau komputer sekolah. "Kami siapkan 10 unit laptop untuk fasilitas guru. Guru wajib menguasai aplikasi dasar komputer, seperti Word, Excel Power Point sehingga ini menjadi kunci keberhasilan proses pembelajaran. Jangan sampai kemampuan mereka tertinggal, sementara siswa sudah lebih dari itu kemampuannya" tutur Basri.

Penerapan sekolah digital disambut baik oleh peserta didik. Ainnusi, siswa kelas XI IPS 3, ia sangat setuju dengan implementasi pembelajaran digital, misalnya dalam hal evaluasi pembelajaran. "Kalau tertulis kan suka ada yang nyontek. Dengan sistem digital, jika sudah *logout* tidak bisa diperbaiki lagi. Terus nilainya lebih akurat. Saya lebih senang belajar yang *online*," tuturnya.

Sistem digital juga diterapkan dalam layanan perpustakaan. Perpustakaan SMAN 1 Gorontalo sudah menggunakan SLIMS, sebuah sistem manajemen perpustakaan yang menyediakan banyak fitur dan kemudahan. Bisa diintegrasikan dengan *peripheral* seperti *scan barcode* dan lain lain.



Demikian pula dalam sistem absensi sudah menggunakan *fingerprint* yang tertempel di dinding. Alat ini digunakan sebagai absensi digital. Siswa cukup menempelkan sidik jarinya ke *reader fingerprint*, komputer yang tersambung akan mencatat kehadirannya, secara otomatis dan terekam dalam basis data.

Untuk kegiatan evaluasi, sekolah ini sudah menerapkan sistem Ujian Berbasis Komputer. Terdapat tiga ruang laboratorium komputer dengan 150 komputer dalam keadaan berfungsi dengan baik. Untuk meningkatkan layanan, sekolah pernah menjajal ujian berbasis android. Namun, masih terkendala *access point*. Dengan keterbatasan akses jaringan menjadi tidak stabil dan tidak terproteksi. Solusinya harus tersedia *access point* di setiap kelas agar setiap siswa bisa mengakses soal atau juga materi pembelajaran” ujar Rahmad, Kepala Laboratorium Komputer.

**“**  
**Dalam menghadapi era 4.0 sekolah ini memberikan kesempatan kepada guru bukan hanya mengajar dengan metode Cara Belajar Siswa Aktif tapi juga bagaimana membawa anak-anak ke dunia maya sebagai ruang pembelajaran.”**

Dalam menghadapi era 4.0 sekolah ini memberikan kesempatan kepada guru bukan hanya mengajar dengan metode Cara Belajar Siswa Aktif tapi juga bagaimana membawa anak-anak ke dunia maya sebagai ruang pembelajaran. Untuk mendukung hal tersebut,

secara periodik sekolah melakukan penambahan sarana seperti komputer dan LCD.

SMA Negeri 1 Gorontalo yang berada di Jl. MH Thamrin No. 8 Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo termasuk sekolah tua di kota ini. Awalnya dari sekolah setingkat SMP pada zaman Belanda, kemudian menjadi Sekolah Menengah Atas pada 1 Agustus tahun 1951. Sejarah mencatat D.W. Eysendingrind Warga Belanda menjadi pemimpin pertama kali di sekolah ini. Kini sekolah memiliki 1.441 peserta didik yang dikelompokkan dalam 40 rombel dan dia-suh oleh 84 pendidik. ●



- 1. Aktivitas peserta didik di ruang kelas SMAN 1 Gorontalo.
- 2. Peserta didik absen masuk sekolah dengan menggunakan *finger print*.
- 3. Aktivitas warga SMAN 1 Gorontalo di pojok literasi.





SMAN 1 SUNGAILIAT

# Menuju Digitalisasi Perpustakaan

**Berbenah memberikan pelayanan terbaik, inilah yang terus dilakukan perpustakaan SMAN 1 Sungailiat. Dengan koleksi buku mencapai lebih dari 14.000 judul, pengelolaan perpustakaan pun menuju ke layanan berbasis digital.**

DIGITAL PERPUSTAKAAN

**D**i masa normal, perpustakaan SMAN 1 Sungailiat, Bangka Belitung, selalu ramai dikunjungi peserta didik. Soal minta baca dan tingkat kunjungan ke perpustakaan di SMA ini memang layak dibanggakan. Di jam istirahat biasanya siswa memenuhi ruang baca, bahkan sampai ke ruangan dalam duduk berlesahan di lantai.

Dari sisi penataan ruangan, tampaknya memang wajar jika siswa senang masuk ke perpustakaan sekolah karena sangat nyaman. Rak-rak buku tersusun rapi dan bahkan ada pula pot tanaman di area pintu masuk. Kenyamanan juga didukung ruangan

yang luas. Maklum, gedung perpustakaan SMA yang berlokasi di Jalan Pemuda, Kompleks Pemda Sungailiat ini, merupakan bangunan tersendiri yang terpisah dari bangunan lain. Menurut Elly Markihati, pustakawan senior di perpustakaan SMAN 1 Sungailiat, luas gedung perpustakaan mencapai 196 m2 ditambah fasilitas toilet di dalamnya. "Perluasan dilakukan sejak enam tahun lalu. Sebelumnya, luas ruangan hanya 96 m2," kata Elly.

Dengan jumlah staf pendukung perpustakaan sebanyak tiga orang termasuk kepala perpustakaan, seluruh siswa SMAN 1 Sungailiat yang pada tahun pelajaran 2019-



Kepala sekolah dan guru SMAN 1 Sungailiat

2020 berjumlah 924 orang harus dilayani dengan baik. Bagi siswa sendiri ada prosedur yang harus dipatuhi ketika masuk ke ruang perpustakaan, mereka harus membuka sepatu agar kebersihan lantai perpustakaan tetap terjaga. Mereka juga harus mengisi buku kunjungan sebelum mendapatkan kartu anggota. Staf perpustakaan perlu waktu untuk mencari kartu siswa yang dilakukan secara manual, apalagi jika siswa datang bersamaan. Tapi ini tak menjadikan kendala dalam hal pelayanan.

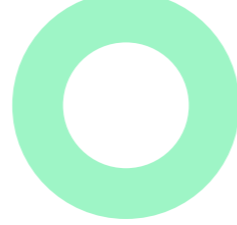
**“ Kami sudah merencanakan perpustakaan masuk ke sistem digital. Paling tidak untuk pelayanan dan akses ke koleksi buku. Jika masih ada fasilitas pendukung yang kurang, segera kami penuhi, ”**

Kepala Sekolah SMAN 1 Sungailiat, Efri Rantos mengakui pihaknya tengah merancang pengelolaan perpustakaan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi di lapangan. Ketika antrean siswa makin banyak, koleksi buku kian bertambah sementara tenaga pelayanan minim, mau tidak mau sekolah harus berbenah. "Kami sudah merencanakan perpustakaan masuk ke sistem digital. Paling tidak untuk pelayanan dan akses ke koleksi buku. Jika masih ada fasilitas pendukung yang kurang, segera kami penuhi," ungkap Efri.

### Memanfaatkan Aplikasi SLiMS

Kepala Perpustakaan Sekolah Anisah Lestari mengungkapkan, saat ini dari 14.000 koleksi buku, pengelola perpustakaan sudah memasukkan data (input) sekurangnya 1.000 judul buku ke dalam server dari satu komputer yang tersedia melalui aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS). "Aplikasi ini belum sepenuhnya kami manfaatkan karena masih terkendala ketersediaan perangkat komputer dan SDM," kata Anisah Lestari. Sebenarnya perpustakaan pernah





mendapat tujuh fasilitas komputer dari laboratorium komputer namun kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan simulasi UNBK yang lebih memerlukan. "Masih ada 1 komputer yang tersedia yang merupakan sumbangan dari Bank Indonesia tapi dimanfaatkan juga oleh siswa untuk mencari bahan pelajaran dari internet," kata Anisah Lestari.

Perpustakaan SMAN 1 Sungailiat yang mendapatkan Akreditasi B berdasarkan kesesuaian Standar Nasional Perpustakaan pada tahun 2018, pernah mendapat bantuan seperangkat lengkap fasilitas untuk perpustakaan dari Bank Indonesia pada November 2018, mulai dari lemari buku beserta 100 buku, sofa, televisi serta

1 komputer datar. Selain telah mendapat Akreditasi B, perpustakaan SMAN 1 Sungailiat juga meraih Juara III dalam Lomba Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tingkat Provinsi pada tahun 2018 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka proses digitalisasi pelayanan dan input koleksi buku, pengelola perpustakaan juga akan melakukan penyaringan koleksi buku hasil dari rekomendasi asesor dari Perpustakaan Nasional. Menurut asesor, koleksi buku kategori fiksi dan non fiksi terlalu banyak sehingga harus diseleksi lagi, dengan skala prioritas untuk diinput mengingat ketersediaan SDM yang ada, juga kemudahan pencarian bagi siswa nantinya.



(Atas ke Bawah) Aktivitas peserta didik di taman baca sekolah dan tim pengurus perpustakaan SMAS Cendana Mandau, Riau



Peserta didik SMAN 1 Sungailiat menggunakan perangkat laptop di perpustakaan sekolah

Bagi Margaretha Martogi, siswa kelas XII MIPA 3 SMAN 1 Sungailiat, perpustakaan adalah jendela dunia. Dari membaca berbagai buku, dia dapat mengetahui tentang apa saja di belahan dunia lain. "Koleksi buku di perpustakaan kami sangat lengkap, ditunjang oleh tersedianya komputer untuk memfasilitasi siswa mencari bahan melalui internet," ungkapnya. Maka jadilah Margaretha sering berkunjung ke perpustakaan, sendiri atau bersama temannya, untuk sekedar membaca atau mengerjakan tugas pelajaran. Margaretha pun berharap pelayanan perpustakaan ke depannya sudah menggunakan sistem digital sehingga referensi belajar semakin mudah didapat, di samping menyediakan suasana yang

sejuk dan nyaman agar makin banyak siswa yang tertarik berkunjung ke perpustakaan.

SMAN 1 Sungailiat telah menorehkan banyak prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Di antaranya menjadi juara sekolah sehat dan Adiwiyata. Di bidang ekstra kurikuler, pernah mendapat medali emas pada ajang O2SN dan keunggulan yang tak tertandingi adalah musikalisasi puisi siswa di bawah asuhan Elly Markihati. SMAN 1 Sungailiat membina sebanyak 924 peserta didik yang terbagi dalam 27 Rombel dengan peminatan jurusan IPA serta IPS. Sementara jumlah guru sebanyak 54 orang. Sejak tahun 2014, sekolah ini menggunakan Kurikulum 2013. ●





# Kuncinya adalah Komunikasi

***Persoalan dalam pelaksanaan sistem zonasi pendidikan yang diawali dengan zonasi PPDB, masih banyak terjadi. Bagi SMAN 1 Lembar, NTB, solusi atas persoalan ini, menjalin komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan, khususnya kepada para wali murid.***

Implementasi zonasi pendidikan masih menjadi persoalan. Kondisi tersebut terjadi karena program yang menjadi jalan untuk pemerataan mutu pendidikan belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak. Padahal melalui pemerataan itu, pendidikan berkualitas kini bukan hanya bisa dinikmati oleh segelintir anak atau siswa.

Adapun tujuan Zonasi Pendidikan adalah menciptakan ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih baik, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, guru dan kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat hingga figur publik untuk membangun pendidikan Indonesia yang merata, adil dan berkualitas. Ekosistem pendidikan inilah diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di wilayah zona masing-masing.

Karena di era otonomi daerah ini, kewenangan pendidikan ada di tangan Pemerintah Daerah --untuk SMA di Pemerintah Provinsi-- maka penetapan zona merupakan kesepakatan bersama antara pusat dan daerah. Dari pemetaan geospasial dan penyediaan data satuan pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memetakan zona sebanyak 2.580 zona pendidikan seluruh Indonesia, zona ini kemudian di-update oleh Pemerintah daerah sesuai kondisi riil di lapangan.

Salah satu bentuk zonasi pendidikan adalah kebijakan tentang sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Melalui PPDB, siapapun memiliki kesempatan untuk bisa belajar di sekolah yang sebelumnya tidak bisa, setelah keluarnya kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018, menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun

radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Selain itu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima serta jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagaimana sosialisasi peraturan ini agar sampai ke calon siswa dan para wali murid dengan pemahaman yang sama, memang tergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing, utamanya adalah kepala sekolah. Kebijakan di SMAN 1 Lembar, NTB, misalnya. Agar masyarakat memahami secara utuh konsep zonasi dan substansi pemerataan yang menjadi target dari regulasi ini, perlu upaya lebih dalam mensosialisasikannya. "Sebagai kepala sekolah saya melakukan sosialisasi di internal terlebih dahulu baik kepada guru maupun tenaga pendidik sehingga jika ada pertanyaan dari masyarakat, siapa pun bisa menjelaskan dengan argumen yang baik," demikian diungkapkan Idris, kepala SMAN 1 Lembar.

“

***Pemahaman yang baik tentang zonasi pendidikan di internal sekolah, sangat penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat satu suara dan memiliki standar yang harus dijaga seluruh elemen sekolah.”***





Sosialisasi tentu tak berhenti di internal lingkungan sekolah, tetapi juga bagi masyarakat khususnya calon para orang tua wali SMAN 1 Lembar. "Sosialisasi di internal kami lakukan dengan menyelenggarakan rapat internal. Agenda intinya dalam sosialisasi itu adalah tujuan dari implementasi zonasi pendidikan sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan nasional," jelasnya. Ia menambahkan, dalam kesempatan sosialisasi juga dijelaskan mengenai tahapan zonasi pendidikan, yang di antaranya diawali zonasi siswa melalui PPDB, selanjutnya pemetaan guru, dan juga sarana prasarana.

Pemahaman yang baik tentang zonasi pendidikan di internal sekolah, Idris menegaskan, sangat penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat satu suara dan memiliki standar yang harus dijaga seluruh elemen sekolah. Langkah yang dilakukan agar semua elemen pendidik memahami zonasi pendidikan, SMAN 1 Lembar menyelenggarakan berbagai pembinaan dengan melibatkan semua tendik dalam pengelolaan sekolah zonasi dan mengikutkan *inhouse training* sekolah zonasi. "Tentu saja secara bertahap, dalam perjalanannya para tendik di SMAN 1 Lembar bisa memahaminya," katanya.

Pada perkembangannya, pemahaman yang baik terhadap zonasi pendidikan membuat warga sekolah, tak hanya tendik, menimbulkan antusiasme karena semua berharap terjadi perbaikan dunia pendidikan. Apalagi dari sisi implementasi, SMAN 1 Lembar juga ditunjuk sebagai sekolah zonasi dan harus membina lima sekolah imbas lainnya. "Dengan demikian status sebagai sekolah zonasi ini memang harus sejalan dengan pemahaman, pengetahuan, dan penguasaan sistem zonasi oleh seluruh pendidik di SMAN 1 Lembar," ujar Idris. Lima sekolah imbas yang diampu adalah SMAN 2 Lembar, SMAN 3 Lembar, SMAN 1 Sekotong, dan SMAN 2 Gerung.

### Komunikasi Kunci Implementasi Zonasi

Dalam tahap zonasi PPDB, sebagai bagian dari program zonasi pendidikan, pelaksanaan di SMAN 1 Lembar berjalan dengan baik. Namun tentu ada saja masyarakat yang merasa belum terakomodasi. Tak banyak memang, misalnya ada wali murid yang mempertanyakan mengapa anaknya tidak bisa diterima di SMAN 1 Lembar.

Beragam persoalan yang muncul, menurut Idris, pada pelaksanaan PPDB tahun lalu bisa diatasi dengan baik. Semua dikomunikasikan, khususnya terkait penjelasan secara komprehensif bahwa zonasi PPDB



Aktivitas warga sekolah di perpustakaan dan lorong SMAN 5 Semarang

sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan sesuai sistem PPDB. "Akhirnya masyarakat bisa memahami karena yang tidak diterima adalah memang berada di lokasi yang jaraknya jauh dari sekolah," katanya.

Selain melakukan penanganan internal, berbagai masalah yang muncul juga diatasi dengan melakukan koordinasi dengan sekolah lain yang menjadi sekolah imbas untuk mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di SMAN 1 Lembar.

"Koordinasi dilakukan dengan kepala sekolah sekitar, ketua panitia PPDB, dinas pendidikan dan juga pemerintah setempat," kata Idris yang juga memberikan catatan untuk zonasi PPDB ada hal yang harus dibenahi yakni ketepatan dan kejelasan lokasi melalui google map, karena ada beberapa nama kampung yang sama dengan kecamatan lain. Ia menambahkan, wujud koordinasi dengan sekolah imbas juga pihaknya tak segan untuk berbagi rombongan belajar.

Terkait catatan penerapan sistem zonasi, Nurhayani, wakil kepala bagian Humas SMAN 1 Lembar menambahkan, meski secara substansi sudah sangat tepat masih butuh penyempurnaan dengan mempertimbangkan masalah yang timbul di awal penerapan. Selain itu, lanjutnya, harus konsisten pada juknis dan juga melakukan evaluasi secara berkala.

Sejauh ini, Nurhayani mengungkapkan, SMAN 1 Lembar sebagai sekolah zonasi sudah optimal melakukan langkah implementasi sesuai juknis. Dalam proses PPDB misalnya, proses dimulai dengan pengumuman penerimaan siswa melalui sistem zonasi, siswa mendaftar dengan melengkapi persyaratan, operator PPDB menginput data dan mengirim ke Dinas Pendidikan Provinsi. Setelah itu, dari data peserta yang sudah terkirim, Dinas Pendidikan Provinsi menentukan siswa yang diterima.

"Penunjukan sekolah zonasi sejauh ini sudah sesuai di antaranya sekolah yang sudah terakreditasi A, sarana prasarana dan tendik memadai, dan tentu saja adanya manajemen sekolah dan kepala sekolah yang andal," ujar Nurhayani. Dengan pola dan sistem yang konsisten, ia pun optimistis zonasi pendidikan yang digagas pemerintah ini akan mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Tanah Air.

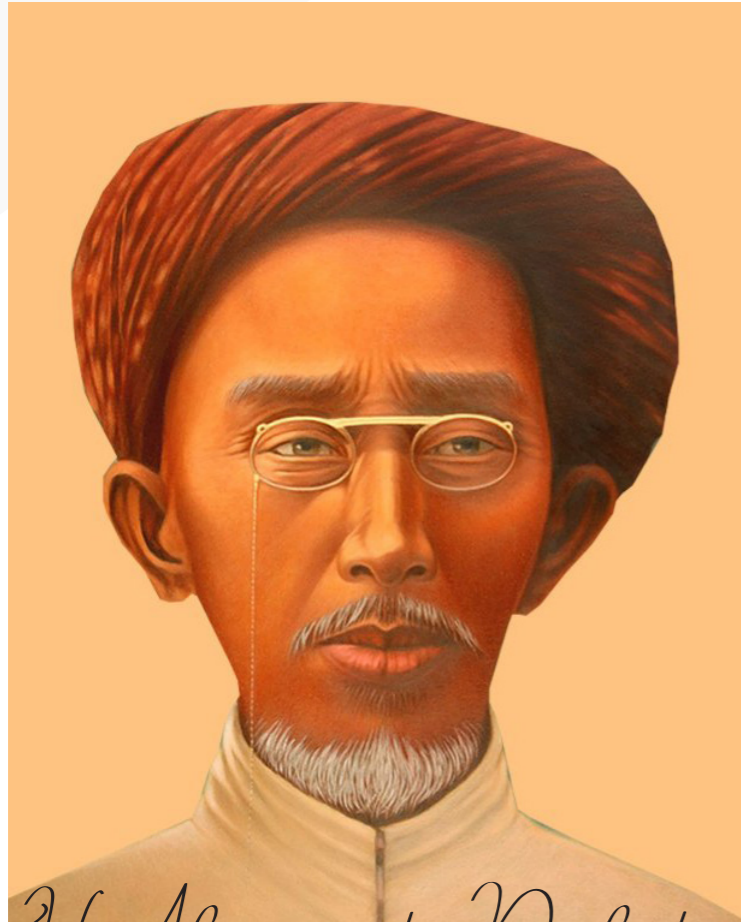
Sementara untuk perbaikan zonasi pendidikan, Idris menambahkan, harus diupayakan penambahan dalam kuota untuk sekolah yang *grade*-nya lebih tinggi, terutama kuota prasejahtera ditambah persentasenya. "Di luar itu, implementasi zonasi pendidikan ini diharapkan bisa konsisten setelah zonasi PPDB, selanjutnya penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumberdaya, dan integrasi antara pendidikan formal dan nonformal segera terwujud," katanya. ●



Kepala Sekolah SMAN 1 Lembar tengah melakukan sosialisasi kepada peserta didik

## ZONASI PENDIDIKAN





*KH Ahmad Dahlan*

# Pelopop Modernisasi Pendidikan

*Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah memelopori pembaruan pendidikan di Indonesia melalui pemikiran pokok kependidikan berupa pembebasan (liberasi), pemaduan (integrasi), dan pembaruan (modernisasi).*

**M**uhammad Darwis, ia lahir pada 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sebuah kampung yang di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, tak seberapa jauh dari Masjid Besar (Jw.Gede) Kauman, Yogyakarta.

Darwis yang kemudian hari bersalin nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir dari trah keluarga ulama. Sang ayah, KH Abu Bakar merupakan Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya, Nyai Abu Bakar adalah putri dari KH Ibrahim, Kepala Penghulu Yogyakarta.

Sedari kecil ia tumbuh dan dididik di lingkungan pesantren. Dari lingkungannya itulah, ia menimba pengetahuan agama dan belajar bahasa Arab. Ia memang tak pernah mencicipi pendidikan formal. Kemampuan literasi ia peroleh dari ayahnya dan kerabat-kerabat dekatnya. Tumbuh di lingkungan informal yang intelek, membuat Darwis kecil tumbuh menjadi

anak yang selalu haus ilmu. Berbagai ilmu ia pelajari, dari mulai ilmu agama hingga pengetahuan umum.

Untuk memenuhi kehausannya menimba ilmu, Darwis remaja menuntut ilmu fiqh, nahwu, falaq, dan hadits. Ia bahkan pernah "nyantri" di Pesantren Saleh Darat di Semarang. Di tempat inilah ia berbagi ruang tidur dengan KH Hasyim Asy'ari, yang kelak mendirikan Nahdlatul Ulama (NU).

Pada 1883, saat usianya 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji. Ia sempat menetap di Makkah untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab. Kiai Dahlan berinteraksi dengan pemikiran para pembaru dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. "Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis (KH Ahmad Dahlan)," dikutip dari Muhammadiyah.or.id.

Di usia 20 tahun (1888), ia kembali ke kampung halamannya. Dua tahun kemudian (1902) ia kembali ke Makkah. Selain beribadah haji ia juga kembali memperdalam ilmunya ke beberapa guru di Makkah. Ia bertemu dengan Rasyid Ridha dan Syekh Khatib dan banyak mendiskusikan perkembangan Islam di Nusantara. Dari hasil diskusi itu, Kiai Dahlan menyimpulkan bahwa dakwah dan pengajaran Islam di Tanah Airnya sudah mengalami ketertinggalan sehingga perlu adanya pembaruan.

Darwis pulang ke Tanah Air setelah dua tahun menimba ilmu di Makkah. Sesuai kebiasaan orang yang baru pulang haji waktu itu, Muhammad Darwis pun mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Sebutan "Kyai" biasa diberikan masyarakat waktu itu kepada orang yang dianggap memiliki ilmu khususnya ilmu agama Islam yang lebih luas dan dalam dibandingkan orang awam pada umumnya.

Di Tanah Air, Ahmad Dahlan melihat Islam banyak dipengaruhi takhayul, khurafat, dan bid'ah, bahkan tidak sesuai dengan perintah Allah Swt yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selain itu juga ada permasalahan lain yang menurutnya sangat perlu diluruskan, yaitu sikap taklid buta masyarakat kepada guru atau ulama. Apapun yang dikatakannya dianggap sebagai kebenaran absolut.

Sikap tersebut, menurut Kiai Dahlan, membuat masyarakat kehilangan daya kritis terhadap kebenaran suatu cerita, pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh kiai atau ulama yang pada saat itu sangat dihormati. Berbagai kondisi inilah yang membuat khawatir Ahmad Dahlan prihatin sehingga terdorong melakukan sesuatu. Didorong oleh para sahabat dan murid-muridnya untuk melakukan suatu pembaharuan secara struktural, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, pada 18 November 1912. Organisasi ini ia jadikan sebagai media penerapan gagasan dan ide pembaruannya.

Sejak awal, Muhammadiyah bersifat sosial dan fokus di bidang pendidikan. Ahmad Dahlan ingin membangun masyarakat melalui sarana pendidikan. Baginya pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan kader-kader Islam yang terdidik. Salah satu langkah awal adalah menyelenggarakan pendidikan untuk perempuan. Sebuah langkah baru mengingat pendidikan untuk perempuan belum dianggap penting pada masa itu.

Ahmad Dahlan juga mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Sistem pendidikan waktu itu memang terbelah menjadi dua kutub ekstrim, satu fokus pada orientasi agama, di sisi lain fokus pada pengetahuan umum (dunia). Sistem ini menghasilkan dua prototipe intelegensia antiagama dan intelegensia sempit. Dahlan mencoba memberi solusi dengan mendirikan lembaga pendidikan yang di dalamnya memadukan ilmu agama dan pengetahuan umum. Ia juga menyodorkan gagasan pembaruan pendidikan yang meliputi aspek filosofis, kelembagaan, strategi, manajemen, dan metodologis.

Ikhtiar Ahmad Dahlan di bidang pendidikan sesungguhnya dalam rangka pembebasan masyarakat Indonesia dari kebodohan, keterjajahan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Untuk mewujudkan hal itu, Ahmad Dahlan berikhtiar membebaskan pendidikan itu sendiri dari kekaburan orientasi dan ketidakberpihakan pada kaum yang tertindas. Selain itu, ia juga mengintegrasikan pengetahuan dengan nilai-nilai dan orientasi hidup, serta memperbarui atau memodernisasi sistem, metodologi, media dan sarana pendidikan. (dbs) ●



“

**AHMAD DAHLAN INGIN MEMBANGUN MASYARAKAT MELALUI SARANA PENDIDIKAN. BAGINYA PENDIDIKAN MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM MENYIAPKAN KADER-KADER ISLAM YANG TERDIDIK.”**



OLEH: NATHANIA LUVENA LAIS

# “Aku, Kamu, Kita: Agen Perubahan”

**Generasi milenial memiliki beban yang berat sebagai penerus bangsa. Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta pengetahuan, menuntut generasi milenial mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berani menunjukkan ide.**

**M**ampu menemukan potensi diri. Inilah kunci bagi generasi milenial agar bisa mengimbangi dan bahkan memenangi tantangan zaman. Dengan potensi diri, generasi milenial harus melatihnya terus-menerus sehingga mampu menggunakan kemampuan itu untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan yang cerah.

Sayangnya, masih banyak generasi milenial ini yang belum atau bahkan tidak dapat mengembangkan kemampuan dalam diri mereka karena banyak hal. Salah satu faktor yang saya sering dapati adalah ekonomi dan lingkungan yang merupakan faktor utama permasalahan ini. Saya, hanya remaja berusia 17 tahun, tetapi menemukan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saya, Nathania Luvena Lais, menemukan potensi diri pertama kali ketika duduk di bangku sekolah dasar. Kegemaran saya membaca. Sejak dini keluarga kecil saya selalu menyediakan fasilitas seperti buku-buku anak-anaknya. Tidak ada yang mengetahui dari kegemaran saya membaca buku fiksi, bangkitlah keinginan untuk membuat karya saya sendiri. Guru saya di Sekolah Dasar Negeri Kampung Bambu 3, Bu Hayati, yang pertama kali menyadari tentang kegemaran saya menulis cerita fiksi. Beliau mendorong saya menggali lebih jauh potensi itu. Bu Hayati bahkan berkomunikasi dengan orangtua saya sekaligus meminta untuk selalu mendukung saya.

Berkat lingkungan rumah dan sekolah yang selalu mendukung hingga sekarang saya telah menghasilkan lebih dari 10 buku cerita anak dan remaja, dan beberapa kali menjadi finalis, pemenang, dan mengikuti berbagai ajang nasional hingga

internasional. Salah satunya, di tahun 2018 ketika baru memasuki kelas 1 di SMA Negeri 8 Kota Tangerang, saya dianugerahi menjadi Duta Baca Kota Tangerang dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kota Tangerang. Tahun 2019, saya juga mendapatkan kesempatan menjadi delegasi Indonesia di ajang Busan International Kids and Youth Film Festival Camp, serta di akhir tahun cerita saya menjadi naskah terbaik pilihan dalam lomba menulis novel anak nasional oleh Dewan Kesenian Jakarta.

## Menularkan Semangat

Menyelami dunia literasi sejak SD, saya menyadari tentang masalah hambatan pengembangan kemampuan anak milenial. Terkadang, pembaca karya saya yang berusia lebih muda atau setara, bercerita tentang keinginan mereka untuk berkarya di usia muda juga tetapi mendapatkan hambatan dari lingkungan keluarga, sekolah, atau faktor lainnya. Tentu saya merasa sedih mendengar dan melihat banyak anak yang memiliki potensi hebat tetapi terhambat untuk menggali lebih dalam dan mengembangkannya lagi.

Terdapat keinginan terhadap masa depan negeri yang lebih baik nantinya; Indonesia maju dengan anak muda yang berbakat dan peduli terhadap

KREASI SISWA  
KREASI SISWA

sesama. Karena sadar tentang faktor lingkungan menjadi salah satu penghambat hal itu, saya membuka perpustakaan kecil untuk anak-anak di lingkungan saya. ‘Perpustakaan Teras Depan Rumah’ yang sudah berlangsung sejak 2018 adalah perpustakaan mini yang tidak hanya menyediakan fasilitas membaca bagi anak-anak di sekitar rumah, tetapi juga kami mengadakan aktivitas dan kegiatan yang bermanfaat untuk mereka. Seperti kelas mendongeng, menulis, dan film pendek.

Perlahan, banyak anak yang menemukan kemampuan dalam dirinya dan mempunyai keinginan untuk mengembangkannya. Salah satu prestasi yang diraih Perpustakaan Teras Depan Rumah adalah mendapatkan penghargaan untuk film pendek yang dibuat oleh anak-anak SD dan SMP pada ajang Festival Film Pelajar Jogjakarta 2019.

Dari Perpustakaan Teras Depan Rumah dan anak-anak di dalamnya, saya sadar bahwa lingkungan yang baik sangat dapat diciptakan. Hanya butuh orang-orang yang sadar terhadap permasalahan ini, untuk mendukung generasi milenial Indonesia menemukan potensi mereka.

Melalui berkarya dan berbagi cerita, saya berharap untuk dapat menjadi bagian agen perubahan menuju Indonesia emas dengan anak muda cerdas dan berkarakter. Saya yakin, bahwa semua bisa menjadi change agent, agen perubahan. Kamu yang sadar dan peduli, hanya butuh satu langkah berani untuk beraksi mendukung anak-anak Indonesia berprestasi. Kita semua bisa menggapai impian itu. ●



## Nathania Luvena Lais:

Juri undangan Real Youth Film Festival Canada (2020), (14th Busan International Kids and Youth (BIKY) Film Camp, 2019; National Children Book Competition held by Jakarta Arts Council, “Jalan Pulang” as the one of six best selected stories 2019; Short Film Competition in Province Banten, “Civic” Short film as 1st Winner 2019; 1st Asian Story-Writing Challenge, as finalist for ‘A Gift From Sky’ story, 2018).





TANTANGAN BELAJAR  
CARA BARU

# Belajar Asyik dan Kreatif di Rumah

WINNER JIHAD AKBAR  
KOORDINATOR BIDANG  
TATA KELOLA DIREKTORAT SMA



**Pertimbangan penting yang diambil Kemdikbud dalam penyelenggaraan tahun pelajaran baru 2020-2021 adalah kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan.**

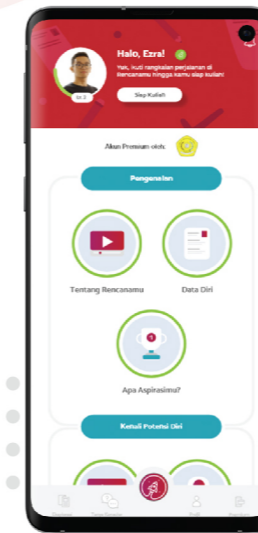
Kondisi pembelajaran di saat pandemi, tentu menjadi situasi yang sama sekali tidak kita harapkan. Situasi yang benar-benar baru bagi kita, yang memaksa kita untuk beradaptasi melalui berbagai pendekatan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pendekatan yang di sisi lain, ternyata memunculkan beragam inovasi dan kreativitas dalam dunia pendidikan kita.

Setidaknya empat bulan di akhir semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020 kita semua bekerja keras beradaptasi menghadapi pandemi. Kita pun hanya belajar dari rumah yang merupakan Kebijakan Kemdikbud sebagai langkah perlindungan warga sekolah dari virus COVID-19. Terlebih sebaran virus yang meluas di Tanah Air.

Menjelang tahun pelajaran baru 2020-2021, jujur harus kita akui kondisi pandemi belum juga membaik. Namun demikian, beragam aspirasi dalam penyelenggaraan pendidikan pun muncul. Mulai dari keinginan siswa untuk bersekolah secara normal bahkan sebaliknya, ada kekhawatiran jika masuk akan muncul cluster sekolah karena peserta didik rentan terdampak COVID-19.

Berbagai hal tentu menjadi pertimbangan Kemdikbud dalam memutuskan penyelenggaraan pendidikan tahun pelajaran baru. Bahkan mengambil kebijakan lintas Kementerian. Termasuk mempertimbangkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang telah menetapkan Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Sejauh ini untuk SMA, baru 7% atau 979 SMA di Zona Hijau akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dan 93% atau 12.971 SMA masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dalam model pembelajaran jarak jauh ini, tentu kita ditantang untuk mencari inovasi dan kreasi baru dalam belajar, baik dengan cara daring, luring, maupun kombinasi keduanya. Jangan sampai berbagai kendala yang kita hadapi menjadikan kita menyerah dalam menempuh pendidikan. Carilah cara-cara baru yang kreatif dan menyenangkan, dengan berbagai aktivitas di rumah, seperti *games*, kuis, *challenge*, atau pembuatan karya kreatif dengan menggunakan perangkat yang ada. Yakinlah, kita bisa belajar dengan lebih menyenangkan dan mendapat pengalaman baru yang belum pernah kita dapati sebelumnya. ●



DIREKTORAT SMA MEMPERSEMBAHKAN

## PLATFORM PERSIAPAN KULIAH PERSONALMU

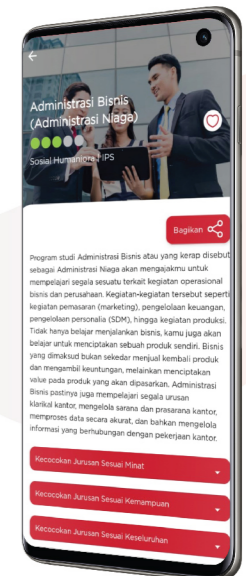
Jangan sampai salah pilih jurusan!  
Cari tau jurusan kuliah dan karier yang kamu banget.  
**Online, instan, tanpa ribet!**

Kini dapat diakses untuk seluruh siswa SMA.  
**Bebas biaya.**



### FITUR SIAP KULIAH RENCANAMU

- Tes **MINAT BAKAT** (Kepribadian, Minat, Kemampuan Kognitif, Gaya Belajar, *Personal Value*)
- Lihat **Tingkat Kecocokan Jurusan Kuliah dan Profesi yang kamu banget**
- Eksplorasi **4.500+ Jurusan, Profesi, Kampus, hingga Beasiswa di Indonesia**
- Panduan **SIAP KULIAH**
- Hasil Tes **Online, Instan, dan Personal**
- Akses *dashboard* untuk setiap sekolah





# SEMANGAT BARU DIREKTORAT SMA



**MAJU BERSAMA  
HEBAT SEMUA!**

**PEMIKIR**

**PEJUANG**

**PEMIMPIN**

Direktorat SMA  
Jl. RS Fatmawati Cipete  
Jakarta Selatan

021-75911532  
publikasi.psm@kemdikbud.go.id  
www.sma.kemdikbud.go.id

SMA Maju Bersama Hebat Semua  
©2020 Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.